



KEMENTERIAN PKP
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2026

**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JAWA I**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

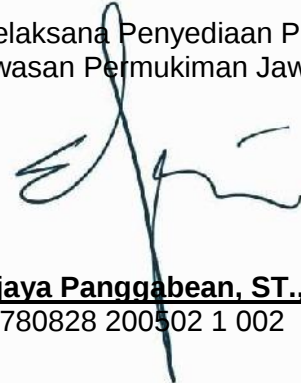
Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I selama Triwulan I Tahun Anggaran 2026, sekaligus sebagai implementasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini memuat gambaran mengenai capaian kinerja pada triwulan I, pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai dalam mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan di wilayah kerja Jawa I.

Penyusunan laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan kinerja pada triwulan berikutnya hingga akhir tahun anggaran, serta menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai kontribusi Balai dalam mendukung kebijakan dan program strategis pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Akhir kata, kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan laporan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, 31 Maret 2026

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Jawa I



Elias Wijaya Panggabean, ST.,MT.

NIP. 19780828 200502 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	3
BAB II CAPAIAN KINERJA	5
2.1 Target Kinerja Triwulan I	5
2.2 Capaian Target Triwulan	8
BAB III PENUTUP	14
3.1 Rencana Tindak Lanjut	14

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Target Penetapan Kinerja BP3KP Jawa I Triwulan I Tahun 2026	5
Tabel 2. 2 Capaian Kinerja BP3KP Jawa I Triwulan I Tahun 2026	8
Tabel 3. 1 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Kegiatan BP3KP Jawa I Triwulan I Tahun 2026.....	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BP3KP	4
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi BP3KP Jawa I.....	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, setiap instansi pemerintah diwajibkan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara terintegrasi. SAKIP merupakan instrumen penting yang menghubungkan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta pelaporan kinerja secara sistematis dan berkesinambungan. Melalui penerapan SAKIP, capaian kinerja instansi pemerintah dapat dipantau, diukur, dan dievaluasi secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa I memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kinerja secara periodik sebagai bagian dari pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Salah satu bentuk pelaporan tersebut adalah Laporan Kinerja Triwulanan yang disusun sebagai media monitoring capaian kinerja dalam kurun waktu tiga bulanan.

Penyusunan laporan kinerja triwulanan dilaksanakan mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja, beserta peraturan terkait lainnya. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya pelaporan kinerja secara berkala guna memastikan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat waktu.

Laporan kinerja triwulanan disusun untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan capaian indikator kinerja, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemanfaatan sumber daya dalam periode triwulan berjalan. Selain itu, laporan ini juga memuat identifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah tindak lanjut yang diperlukan sebagai upaya perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penerapan prinsip good governance, penyusunan laporan kinerja triwulanan menjadi bagian penting dalam siklus manajemen kinerja di lingkungan BP3KP Jawa I, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan BP3KP Jawa I Tahun 2026 merupakan wujud komitmen organisasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, sekaligus sebagai instrumen pengendalian internal untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tetap berada pada jalur yang telah direncanakan serta mendukung pencapaian target kinerja tahunan secara optimal.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat BP3KP adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman, dengan rincian tugas yaitu melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, serta fasilitasi serah terima aset. Dalam melaksanakan tugas tersebut, diselenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
- h. pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- n. pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan

- o. pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi BP3KP Jawa I terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025. Secara organisasi BP3KP Jawa I membawahi 2 (dua) wilayah satuan kerja (satker), diantaranya yaitu Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman DK Jakarta dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Banten.

Susunan organisasi di BP3KP Jawa I terdiri dari Kepala Balai dan didukung oleh Subbagian Umum dan Tata Usaha, Seksi Pelaksana Wilayah I, Seksi Pelaksana Wilayah II, serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Berikut ini merupakan susunan organisasi dan tugasnya masing-masing di BP3KP Jawa I:

1. Kepala Balai

Bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi BP3KP di wilayah kerja Jawa I yang meliputi Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Provinsi Banten.

2. Subbagian Umum dan Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga, administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, penerapan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko, pelaksanaan komunikasi publik, serta pemberian layanan hukum balai.

3. Seksi Pelaksana Wilayah I

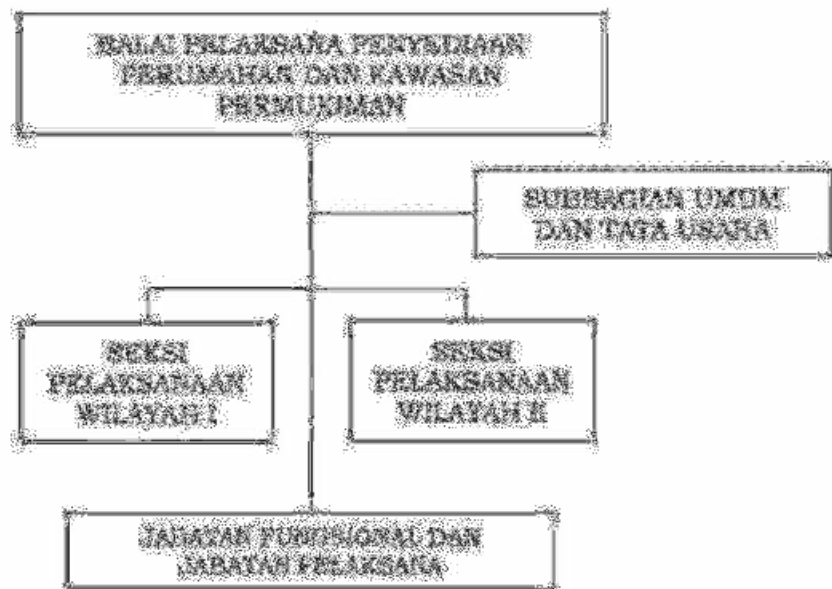
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembangunan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitas penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta verifikasi data pada wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir di Provinsi Daerah Khusus Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Seksi Pelaksana Wilayah II

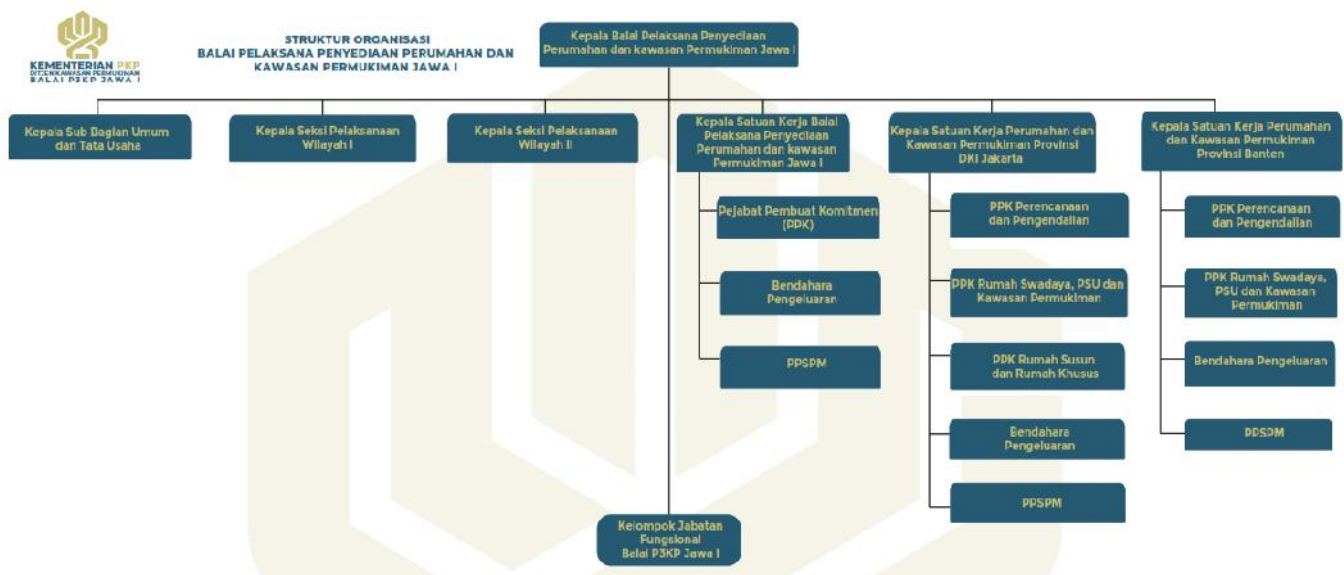
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembangunan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitas penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta verifikasi data pada wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir di Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan UPT sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BP3KP



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi BP3KP Jawa I

BAB II

CAPAIAN KINERJA

2.1 Target Kinerja Triwulan I

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa I menjabarkan target pencapaian tahun 2026 dalam target kinerja triwulanan. Target kinerja triwulanan menjadi salah satu instrumen untuk melihat capaian kinerja secara berkala yang nantinya akan disampaikan dalam Laporan Kinerja Triwulanan sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Target Penetapan Kinerja BP3KP Jawa I Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
SEKRETARIAT JENDERAL								
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen balai	Jumlah Layanan Umum	Layanan	3	25,63			
		Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	3				
		Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	14				
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN								
1.	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	32,23			
2.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	1				
		Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas (PK)	Unit	600				
		Jumlah Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu	Hektar	15,47				
		Jumlah Unit Rumah yang Memiliki Akses Sanitasi Layak (PK)	Unit	106				

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
3.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Jumlah Layanan BMN	Layanan	1				
		Jumlah Layanan Umum	Layanan	3				
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1				
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN								
1.	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	Jumlah Dokumen Kebijakan, Kemitraan, Strategi, Dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	38			
		Jumlah Dokumen Data Dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Dokumen	1				
		Jumlah Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	1				
2.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan	Jumlah Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	1				
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1				
		Jumlah Laporan Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1				
		Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas	Unit	900				
		Jumlah Rumah Khusus yang Terbangun	Unit	221				
3.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Jumlah Layanan Umum	Layanan	2				
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1				

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN								
1.	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	46,29			
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	3				
2.	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1				
3.	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1				
4.	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1				
5.	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1				
		Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	Unit	2.900				
6.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Jumlah Layanan BMN	Layanan	1				
		Jumlah Layanan Umum	Layanan	3				
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1				
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO								

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1.	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	2,97			
2.	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	2				
3.	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Laporan	1				

2.2 Capaian Target Triwulan

Capaian kinerja BP3KP Jawa I pada triwulan I tahun 2026 yang disajikan pada tabel di bawah ini menunjukkan tingkat realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai hasil dari proses perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan. Informasi ini menjadi landasan dalam melakukan evaluasi kinerja secara komprehensif, khususnya dalam menilai kesesuaian antara target dan realisasi serta merumuskan langkah perbaikan pada triwulan berikutnya.

Tabel 2. 2 Capaian Kinerja BP3KP Jawa I Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
SEKRETARIAT JENDERAL						
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen balai	Jumlah Layanan Umum	Layanan	3		25,63
		Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	3		
		Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	14		
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN						

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
1.	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1		32,23
2.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	1		
		Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas (PK)	Unit	600		
		Jumlah Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu	Hektar	15,47		
		Jumlah Unit Rumah yang Memiliki Akses Sanitasi Layak (PK)	Unit	106		
3.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Jumlah Layanan BMN	Layanan	1		
		Jumlah Layanan Umum	Layanan	3		
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1		
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN						
1.	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	Jumlah Dokumen Kebijakan, Kemitraan, Strategi, Dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1		38
		Jumlah Dokumen Data Dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Dokumen	1		
		Jumlah Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	1		
2.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan	Jumlah Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	1		

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1		
		Jumlah Laporan Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1		
		Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas	Unit	900		
		Jumlah Rumah Khusus yang Terbangun	Unit	221		
3.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Jumlah Layanan Umum	Layanan	2		
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1		
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN						
1.	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1		44,13
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	3		
2.	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1		
3.	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1		

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
4.	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1		
5.	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1		
		Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	Unit	2.900		
6.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Jumlah Layanan BMN	Layanan	1		
		Jumlah Layanan Umum	Layanan	3		
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1		
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO						
1.	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1		1,11
2.	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	2		
3.	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Laporan	1		

2.3 Potensi dan Permasalahan Capaian Triwulan

Pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP Jawa I pada periode pelaporan telah berjalan sesuai tahapan perencanaan, meskipun sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap

persiapan, verifikasi, dan koordinasi. Beberapa potensi yang dimiliki dapat menjadi faktor pendorong percepatan pelaksanaan program pada triwulan berikutnya, namun masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian untuk mendukung pencapaian target kinerja secara optimal.

2.3.1 Potensi

Pelaksanaan program dan kegiatan BP3KP Jawa I memiliki beberapa faktor pendukung yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan capaian kinerja, antara lain:

1. Kesiapan data calon penerima bantuan (CPB) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Pelaksanaan verifikasi CPB BSPS telah dilakukan sehingga tersedia basis data awal yang dapat digunakan untuk mempercepat proses penetapan penerima bantuan dan pelaksanaan kegiatan fisik.

2. Ketersediaan hasil verifikasi administrasi dan teknis kegiatan penanganan permukiman kumuh

Pelaksanaan verifikasi administrasi dan teknis menjadi dasar yang kuat dalam penentuan lokasi prioritas dan penyusunan rencana penanganan kawasan permukiman kumuh pada tahap selanjutnya.

3. Kesiapan dokumen dan lokasi usulan bantuan Rumah Khusus

Verifikasi administrasi dan kesiapan lokasi usulan bantuan Rumah Khusus telah dilaksanakan, disertai penyusunan dokumen koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah khusus pascabencana di Provinsi Banten, sehingga mendukung percepatan implementasi program setelah alokasi anggaran dan persetujuan program tersedia.

4. Dukungan kolaborasi melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan Gotong Royong Merah Putih merenovasi dan membangun rumah, kegiatan bedah rumah dan pembangunan rumah, serta renovasi RTLH dan UMKM menunjukkan adanya potensi sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung penyediaan hunian layak.

5. Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan melalui Klinik PKP

Penyelenggaraan sosialisasi Klinik PKP menjadi sarana edukasi dan koordinasi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya terkait program perumahan dan kawasan permukiman.

2.3.2 Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja, yaitu:

a. Faktor Internal

1. Sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap persiapan dan verifikasi
Kegiatan BSPS, penanganan permukiman kumuh, dan bantuan Rumah Khusus masih berfokus pada tahapan verifikasi administrasi, verifikasi teknis, serta penyusunan dokumen pendukung sehingga realisasi fisik kegiatan belum dapat dilaksanakan.
2. Keterbatasan kesiapan pelaksanaan bantuan peningkatan kualitas sanitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Program bantuan peningkatan kualitas sanitasi bagi MBR belum dapat berjalan sehingga belum memberikan kontribusi terhadap capaian fisik maupun manfaat program pada periode pelaporan.
3. Masih diperlukan penguatan koordinasi lintas program dan pemangku kepentingan
Pelaksanaan program yang melibatkan berbagai pihak memerlukan sinkronisasi perencanaan, data, dan jadwal pelaksanaan agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

b. Faktor Eksternal

1. Ketergantungan terhadap proses persetujuan dan dukungan dari pemerintah daerah serta instansi terkait
Pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh dan bantuan Rumah Khusus memerlukan dukungan data, dokumen, serta kesiapan lokasi dari pemerintah daerah sehingga proses pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh kecepatan pemenuhan persyaratan tersebut.
2. Tingginya kebutuhan koordinasi dengan mitra dan pihak pendukung program CSR
Implementasi program CSR memerlukan komitmen dan kesepakatan bersama dengan berbagai pihak sehingga proses perencanaan dan persiapan kegiatan membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang sebelum memasuki tahap pelaksanaan.
3. Dinamika kebijakan dan penganggaran program perumahan dan kawasan permukiman
Perubahan prioritas program dan proses penganggaran dapat mempengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan serta kecepatan realisasi program di lapangan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya percepatan pelaksanaan program dan perbaikan kinerja, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Percepatan penyelesaian tahapan verifikasi dan persiapan program
Melakukan percepatan penyelesaian verifikasi administrasi, verifikasi teknis, dan validasi data pada kegiatan BSPS, penanganan permukiman kumuh, dan bantuan Rumah Khusus guna memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan pada tahap berikutnya.
2. Penguatan koordinasi pelaksanaan bantuan peningkatan kualitas sanitasi MBR
Melakukan koordinasi intensif dengan unit teknis terkait untuk memperoleh kejelasan pelaksanaan program, termasuk pemenuhan persyaratan administrasi, teknis, dan dukungan pendanaan yang diperlukan.
3. Peningkatan kualitas perencanaan dan kesiapan dokumen kegiatan
Menyelesaikan penyusunan dokumen pendukung, rencana kerja, jadwal pelaksanaan, serta kebutuhan administrasi lainnya guna meminimalkan hambatan pada saat kegiatan memasuki tahap pelaksanaan.
4. Penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan
Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta pihak lainnya untuk mempercepat pemenuhan data, dokumen, dan kesiapan lokasi yang menjadi persyaratan pelaksanaan program.
6. Optimalisasi pelaksanaan program CSR bidang perumahan
Mendorong finalisasi perencanaan dan kesepakatan kerja sama dengan mitra CSR sehingga kegiatan Gotong Royong Merah Putih, bedah rumah, pembangunan rumah, renovasi RTLH, dan dukungan UMKM dapat segera direalisasikan.
7. Peningkatan fungsi sosialisasi dan pendampingan melalui Klinik PKP
Melaksanakan sosialisasi dan konsultasi secara berkelanjutan kepada pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan guna meningkatkan pemahaman serta mempercepat penyelesaian permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman.
8. Penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progres setiap kegiatan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, jadwal, dan ketentuan yang berlaku..

Tabel 3. 1 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Kegiatan BP3KP Jawa I Triwulan I Tahun 2026

TRIWULAN I		
Permasalahan		Rencana Tindak Lanjut
SEKRETARIAT JENDERAL		
1.	Pelaksanaan layanan sarana dan prasarana internal serta layanan dukungan manajemen memerlukan peningkatan koordinasi dan monitoring agar seluruh target layanan dapat tercapai sesuai rencana	Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan layanan pendukung serta meningkatkan koordinasi antar unit kerja dalam pemenuhan kebutuhan operasional balai
2.	Penyusunan dokumen SAKIP memerlukan penguatan kualitas data dukung dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja	Melakukan reviu dan validasi data kinerja secara berkala serta meningkatkan koordinasi dengan seluruh penanggung jawab kegiatan dalam penyusunan dokumen SAKIP
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN		
1.	Kegiatan bantuan peningkatan kualitas sanitasi bagi MBR belum dapat dilaksanakan sehingga realisasi fisik kegiatan belum tercapai	Menyiapkan data pendukung, melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait, dan menyelesaikan tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan agar dapat segera dilaksanakan setelah dukungan program tersedia
2.	Kegiatan penanganan permukiman kumuh masih pada tahap verifikasi administrasi dan teknis sehingga belum memasuki tahap pelaksanaan fisik.	Mempercepat penyelesaian verifikasi administrasi dan teknis serta menyiapkan dokumen pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pada tahap berikutnya
3.	Sosialisasi Klinik PKP masih perlu ditingkatkan untuk memperluas jangkauan layanan kepada pemerintah daerah dan masyarakat	Meningkatkan frekuensi sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan kepada pemangku kepentingan guna meningkatkan pemanfaatan layanan Klinik PKP
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN		
1.	Kegiatan BSPS masih pada tahap verifikasi CPB sehingga pelaksanaan fisik bantuan belum dimulai	Mempercepat proses verifikasi dan validasi CPB, melaksanakan pembinaan fasilitator, serta melakukan koordinasi dengan bank penyalur untuk mendukung percepatan pelaksanaan BSPS
2.	Kegiatan bantuan Rumah Khusus masih pada tahap verifikasi administrasi dan kesiapan lokasi usulan sehingga belum memasuki tahap pelaksanaan konstruksi	Menyelesaikan verifikasi administrasi dan teknis serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan kesiapan lokasi dan dokumen pendukung pelaksanaan program
3.	Program CSR perumahan masih pada tahap perencanaan dan penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan	Mempercepat finalisasi dokumen pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan koordinasi dengan mitra CSR untuk mendukung percepatan implementasi program bedah rumah, pembangunan rumah dan renovasi RTLH
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN		

TRIWULAN I		
Permasalahan		Rencana Tindak Lanjut
1.	Kegiatan BSPS masih pada tahap verifikasi CPB sehingga pelaksanaan fisik bantuan belum dimulai	Mempercepat proses verifikasi dan validasi CPB, melaksanakan pembinaan fasilitator, serta melakukan koordinasi dengan bank penyalur untuk mendukung percepatan pelaksanaan BSPS
2.	Program CSR perumahan masih pada tahap perencanaan dan penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan	Mempercepat finalisasi dokumen pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan koordinasi dengan mitra CSR untuk mendukung percepatan implementasi program bedah rumah, pembangunan rumah, renovasi RTLH, dan dukungan UMKM
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO		
1.	Implementasi pembangunan Zona Integritas masih memerlukan penguatan pemenuhan eviden dan internalisasi kepada seluruh pegawai	Melakukan monitoring pemenuhan eviden, penguatan peran kelompok kerja, serta sosialisasi dan internalisasi pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan
2.	Penerapan manajemen risiko memerlukan peningkatan kualitas identifikasi, analisis, dan pemantauan risiko pada seluruh proses bisnis balai	Melakukan reviu berkala terhadap register risiko, pemantauan rencana tindak pengendalian, serta pendampingan penerapan manajemen risiko kepada unit kerja terkait